



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : UNIT INDUK DISTRIBUSI ACEH (UID ACEH)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUNDHAKIR
2. Jabatan : GENERAL MANAGER
3. NHK : 205044

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.447.500.000**

1. Tanah Seluas 272 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 261 m2/178 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 41 m2/41 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 667.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **785.250.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000
2. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOBIL, HONDA CR-V 1.5 TC PRESTIGE Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
5. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.8VRZ 4X2 A/T (GUN166R-SDTHXD) Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **38.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	857.613.154
F. HARTA LAINNYA	Rp.	1
Sub Total	Rp.	4.128.363.155
III. HUTANG	Rp.	245.833.333
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.882.529.822

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.